

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maulidiah, Sri, *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta, 2014.
- Rimbawani Sushanty, Vera, *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Ubhara Press: Surabaya, 2020.
- Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sinambela, Lijan Poltak, *et.al.*, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Subekti, Rahayu, *et.al.*, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Jurnal

Azmiati Zuliah, Mhd. Asri Pulungan, “Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia.” *Law_jurnal* 1, no. 1 (2020): 33.

Bambang Irawan, Sonny Subroto Maheri Laksono, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik, Profesionalisme, Kinerja Pegawai Sebagai Upaya Kepuasan Masyarakat *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no.1 (2019): 29.

Denico Doly, “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat Mudik Lebaran,” *Jurnal Info Singkat* 11, no. 11 (2019): 3.

Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Optimalisasi Pelayanan Publik di Bidang Perizinan,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1, (2016): 60.

Elly Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1-3.

Elviandri, *et.al*, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,” *Mimbar Hukum* 31, no.2 (2019): 252-266.

Francisca Romana Harjiyatni, dan Suswoto, “Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 4, (2017): 602.

- Hadiyono, V, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya," *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 1, no. 1, (2020): 23-28.
- Hanny Purnamasari, M. Bintang Ramadhan, Hasfirulloh S.B, & Diana Noviyanti "Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Motor (SIM C) di Polres Karawang," *Jurnal Politikom Indonesiana* 5, no. 2 (2020): 66.
- Hari Agus Santoso, "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerjs Terhadap Peningkatan Investasi, " *Jurnal Hukum Positum* 6, No.2, (2021): 225.
- Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no.1 (2011): 139.
- Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib, "Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)," *Dedikasi: Jurnal Sosial, Hukum, Budaya* 22, No. 2 (2021): 109.
- Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no.2, (2019): 221.
- Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Adminitrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 230.

Muh. Risnain, “Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan”, *Jurnal RechtsVinding* 5, no. 3 (2016): 300.

Purwanto, “Restrukturisasi Pelayanan Perizinan untuk Menciptakan Pelayanan Publik yang Lebih Baik,” *Jurnal Spektrum Hukum* 00, no. 0, (2020): 96-97.

Rifta Dimas S, Muhammad Rifki S, “Tranformasi Digital dalam Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM): Studi Kasus Korlantas Polri,” *Technomedia Journal (TMJ)* 8, no. 2SP, (2023): 191.

Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 3, (2019): 551.

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; dan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

Internet

“Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan”, Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY, diakses pada 25 November 2024, <https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/>.

“Mengenal Pelayanan Publik”. OMBUDSMAN RI, diakses pada 27 November 2024, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>.

“Kajian Yuridis tentang Kewenangan POLRI Dalam Menerbitkan SIM, STNK dan BPKB”. TBNews, diakses pada 28 November 2024, <https://tribratanews.bengkulu.polri.go.id/kajian-yuridis-tentang-kewenangan-polri-dalam-menerbitkan-sim-stnk-dan-bpkb/>.

“Pendaftaran SIM Internasional”, KORLANTAS POLRI, diakses pada 21 Januari 2024, <https://siminternasional.korlantas.polri.go.id/>.